



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
Jalan Semila Jati II Desa Gubug Kabupaten Tabanan**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan kinerja perangkat daerah adalah wajib disusun oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sebagaimana yang telah dirumuskan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disusun atas komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data, informasi, dan hasil analisis kinerja sehingga laporan ini dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengemban amanah urusan wajib dasar, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja yang optimal dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam rencana startegis perangkat daerah.



Tabanan, 28 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	4
1.2.1 Kedudukan	4
1.2.2 Urusan Wajib Dasar	4
1.2.3 Tugas Pokok	5
1.2.4 Fungsi	5
1.2.5 Struktur Organisasi	6
1.3 Tujuan	11
1.4 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 RPJMD Semesta Berencana	9
2.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	11
2.3 Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD)	14
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.5 Rencana Kerja Tahunan	15
2.6 Perjanjian Kinerja	19
2.7 Formula Pengukuran Kinerja	20
2.8 Formula Pengukuran Kinerja mendukung Renstra	21
2.9 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	22
2.10 Rencana Monev Rencana Aksi	22
2.11 Cascading	23
2.12 Crosscating	23
2.13 Pohon Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Pengukuran Kinerja	24
3.2 Pengumpulan Data Kinerja	24
3.3 Capaian Kinerja	25
3.4 Analisis Capaian Kinerja	26
3.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	26
3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	29
3.4.3 Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir Renstra	30
3.4.4 Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota	30
3.4.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	31
3.4.6 Analisis Efisiensi Sumber Daya	34
3.4.7 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja	36
3.5 Kinerja Keuangan	39
3.6 Rencana Tindak Lanjut LHE AKIP	41
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Data Capaian Kinerja Organisasi BPBD.....	2
1.2 Data Pegawai pada BPBD	6
1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD	6
2.1 Rencana target Kinerja SPM.....	10
2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah	10
2.3 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD	11
2.4 Tujuan dan Sasaran BPBD	12
2.5 Sasaran dan Strategi BPBD	12
2.6 Strategi dan Kebijakan BPBD	13
2.7 Sasaran, Program, dan Kegiatan	13
2.8 IKU BPBD.....	15
2.9 Penjabaran Anggaran TA 2025	17
2.10 Perjanjian Kinerja	19
2.11 Pengukuran Indikator SPM.....	20
2.12 Pengukuran Indikator IKD	20
2.13 Pengukuran Indikator Kinerja Utama.....	21
2.14 Rencana Aksi Pencapaian Target IKU	22
2.15 Pengukuran Indikator Kinerja Program.....	25
3.1 Capaian kinerja IKU	26
3.2 Capaian kinerja IKP	26
3.3 Analisis Kinerja Dibandingkan target Renstra	27
3.4 Analisis Kinerja Program mendukung IKU	28
3.5 Perkembangan Pencapaian IKT.....	29
3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	29
3.7 Perkembangan Nilai IRB Kabupaten/Kota dan Provinsi	31
3.8 Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan	33
3.9 Dukungan Aparatur dan Kinerja Kebencanaan	34
3.10 Anggaran Mendukung Tujuan dan Sasaran BPBD	35
3.11 Efisiensi Penggunaan Anggaran	35
3.12 Sinkronisasi Sasaran dan Program	37
3.13 Sinkronisasi Program dan Kegiatan	37
3.14 Evaluasi Pelayanan Kebencanaan.....	38
3.15 Realisasi Keuangan	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komitmen yang kuat dari jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam menjalankan amanah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tahun keempat seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat penjelasan tentang capaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* yang merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 maka BPBD mengelola anggaran Rp. 6.308.411.200,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 6.050.087.400,00 (Belanja pegawai Rp. 4.149.358.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.900.729.400,00) atau 95,90% dan belanja modal sebesar Rp. 258.323.800,00 (4,10%).

Seiring dengan dinamika pembangunan maka adanya kebijakan efisiensi anggaran di anggaran pergeseran dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 59.085.900,00 sehingga anggaran yang dikelola menjadi Rp. 6.296.439.700,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 6.038.115.900,00 (Belanja pegawai Rp.4.149.358.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.659.520.430,00) atau 95,89% dan belanja modal sebesar Rp. 258.323.800,00 (4,11%).

Hasil analisis capaian kinerja tahun 2025, menunjukkan capaian 2 (dua) tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu : indeks risiko bencana tahun 2024 sebesar 122,13 dan dapat diturunkan 4,43% menjadi 116,72 (diatas target provinsi 2,0%) dan penilaian reformasi birokrasi (baik penilaian general dan tematik), BPBD tidak menjadi sampel dalam penilaian pemerintahan daerah. Hasil analisis 2 (dua) sasaran strategis dan diukur melalui 2 (dua) IKU, dengan indikator

prosentase layanan tanggap bencana sudah 100% dan indikator nilai LkjIP masih dalam proses penilaian Inspektorat. Ini menunjukkan tingkat keberhasilan adalah sudah baik dan belum ada pengaduan masyarakat rawan bencana / terampak bencana di SP4N LAPOR, dengan dukungan capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja program sebesar 100,0% dan didukung dari capaian rata-rata kinerja 10 (sepuluh) kegiatan dengan *output* sebesar 95,50%, serta sudah terintegrasi dengan capaian indikator inddikator kienrja daerah (IKD) di RPJMD yaitu tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan dengan realisasi sudah 100,0%.

Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 75,29% yang terdiri dari capaian kinerja program penanggulangan bencana sebesar 82,10% dengan efisiensi anggaran 17,9% dan realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 74,63% dengan efisiensi anggaran 25,37%. Adanya efisiensi penggunaan anggaran tidak mengurangi capaian kinerja fisik atau output program karena aparatur dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan administrasi dan pelayanan publik telah memberikan pelayanan dengan optimal sesuai standar pelayanan.

Terhadap kinerja yang belum tercapai utamanya di indikator nilai LKJIP yang baru BB dari target A, maka pimpinan BPBD telah menginstruksikan Sekretariat untuk melakukan pengkajian, berinovasi, dan mengambil langkah-langkah startegis dan terukur untuk pencapaian indikator pembangunan lebih baik kedepan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan tupoksi di tahun berikutnya. Agar dapat dipahami oleh semua aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, laporan ini akan dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan program prioritas di masa yang akan datang sehingga AKIP perangkat daerah dapat sinergis dengan SAKIP kabupaten.



Tabanan, 28 Januari 2026
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan
[Signature]
Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan akan diwujudkan dalam 8 (delapan) misi yang dikenal dengan Asta Cita. Dari Asta Cita tersebut yang paling relevan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah Asta Cita yang kedua yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Asta Cita kedua diatas relevan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Tabanan di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*exoficio*) Sekretaris Daerah dan kesehariannya dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana. Sesuai Pasal 9 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 dinyatakan unsur pelaksana berada di bawah Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan fungsi utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut di Pasal 12 menyebutkan BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Posisi Kabupaten Tabanan secara geografis, demografis, dan geologis merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam dan bencana non alam. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana menyatakan Kabupaten Tabanan termasuk daerah rawan bencana. Telah teridentifikasi ada 9 (Sembilan) ancaman bencana diantaranya banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, kebakaran permukiman/hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrem (angin kencang/puting beliung), longsor, gelombang ekstrem (abrasi).

Dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana diperlukan struktur manajemen bencana yang mengedepankan pentingnya partisipasi semua

potensi yang ada baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat (sesuai lambang segitiga biru). Partisipasi dari semua potensi tersebut tentunya perlu dikoordinir sehingga manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas yang berat di urusan wajib dasar sub urusan bencana karena dari kajian risiko bencana 133 (seratus tiga puluh tiga) desa di Kabupaten Tabanan rawan bencana alam dan bencana non alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan yang *good governance* dan pelayanan publik kebencanaan utamanya layanan data, informasi, komunikasi dan pelaporan bencana yang *respon time* 24.7 (24 jam 7 hari kerja) sehingga berdampak pada indikator kinerja utama organisasi.

Evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Tabanan tahun 2024 atas pencapaian indikator kinerja organisasi masih belum optimal disajikan seperti berikut ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Target kinerja	Capaian kinerja	%	Sumber
1	Indeks ketahanan daerah	0,64	0,63	98,64	Penilaian Kepala BNPB Nomor B-06.17/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
2	SPM sub urusan bencana	100%	100%	100,0	Penilaian spm.kemendagri.go.id
3	Laporan kinerja instansi pemerintah	81,0	72,85	89,94	Penilaian LHE Insektorat Nomor 0003.1/2851/Irbn1/2025

Sumber : BPBD, 2025

Dari data kinerja diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2025 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*), dan 4). Kompetensi sumber daya aparatur kebencanaan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Mengacu pada hal tersebut diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job

deskripsi tersebut dinilai dalam laporan kinerja, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada sub kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program dan kegiatan, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan penekanan pada hasil yang berdampak pada layanan kebencanaan. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib dasar sub urusan bencana.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan berkedudukan sebagai badan yang mengkoordinasikan pelaksanaan urusan wajib dasar sub urusan bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanahkan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan urusan.

Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan amanah pelayanan wajib dasar telah menerbitkan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya BPBD yang menjadi tipe A yang terdiri atas 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Umum dan Staf Pelaksana.

1.2.2 Urusan Wajib

Sesuai Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 di Pasal 5 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Susunan organisasi BPBD sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 5 yaitu terdiri dari : Kepala BPBD, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BPBD sesuai Pasal 6 dinyatakan exoficio adalah Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah sesuai Pasal 7 terdiri dari pejabat pemerintah dan masyarakat profesional (yang dipilih oleh DPRD). Unsur pelaksana sesuai Pasal 9 terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1.2.3 Tugas Pokok

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1.2.4 Fungsi

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPBD. Unsur pengarah sesuai Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Lebih lanjut pada Pasal 9 dinyatakan unsur pelaksana berada di bawah Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dengan fungsi :

- a. Koordinasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan atau dan pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- b. Komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 dinyatakan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 10 Ayat 2 menyatakan Sekretaris memiliki fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis BPBD.
- b. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- c. Fasilitasi tugas unsur pengarah dan usur pelaksana.
- d. Penyelenggaraan urusan kehumasan.
- e. Penyelenggaraan pusat data dan informasi.

Pada Pasal 11 dinyatakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kabid.

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, koordinasi, pelaporan dan pengawasan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan urusan penanggulangan bencana.
- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan operasional penanggulangan bencana, kedaruratan serta penanganan pengungsi dan logistik.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi melaksanakan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.2.5 Struktur Organisasi

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan disajikan seperti gambar di berikut ini.



Gambar : 1.1
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tabanan

1.2.6 Sumber Daya Aparatur

Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan sumber daya manusia yang menduduki jabatan baru yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Data Pegawai pada BPBD

No	Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
		2021 (TipeB)	2025 (TipeA)	
1	Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
2	Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
3	Fungsional Umum	15 orang	7 orang	Fungsional Umum/ Pelaksana di sekretariat dan bidang
4	PPPK	0 orang	21 orang	Kelas IX dan Kelas V
5	Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	27 orang	Staf lapangan non ASN
6	Tenaga Kontrak	12 orang	11 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sumber daya yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi standar. Adapun data sumber daya aparatur seperti berikut ini.

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD

No.	Pendidikan	Jumlah/ orang	Jenis Kelamin/ orang	
			Pria	Wanita
a	PNS dan P3K Penuh Waktu			
1	Strata 2 (S2)	3	3	-
2	Strata 1 (S1)	11	7	4
3	D-3	-	-	-
4	D-1	-	-	-
5	SLTA/SMK	20	14	6
	Jumlah	34	24	10
b	P3K Paruh Waktu			
1	Strata 2 (S2)	-	-	-
2	Strata 1 (S1)	4	1	3
3	D-3	-	-	-
4	D-1	-	-	-
5	SLTA/SMK	38	34	4
	Jumlah	42	35	7

Sumber : DUK, 2025

1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- b. Memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- c. Memberikan analisis pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yaitu indikator kinerja daerah (IKD), indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja program (IKP) yang menjadi urusan BPBD pada misi pertama RPJMD Semesta Berencana.

1.5 Sistematika Penyajian

Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran Perjanjian Kinerja Lampiran Lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan berkomitmen melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dengan inovatif, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun pedoman perencanaan kinerja sesuai dokumen SAKIP sudah dijabarkan sesuai dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026.
2. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
4. Indikator Kinerja Utama RPJMD SB urusan wajib dasar
5. Indikator Kinerja Daerah
6. Indikator Kinerja Utama
7. Rencana Kerja Tahun 2025.
8. RKA dan DPA Tahun 2025
9. Perjanjian Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.
10. Pengukuran Indikator Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.
11. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
12. Cascading
13. Croscating
14. Pohon kinerja

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang dirancang selama satu periode masa kepemimpinan Kepala Daerah/ Bupati terpilih yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD 2005-2025) keempat, dimana setiap perangkat daerah wajib melaksanakannya untuk mencapai sasaran pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana sebagai berikut :

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan

Era Baru : Aman, Unggul. Madani (AUM)

- Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Tujuan : 1. Masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
- Indikator : Persentase capaian SDGs terhadap target rencana aksi daerah (RAD). Target tahun 2025 adalah 70%.
- Sasaran : 1.Terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Indikator : Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, keetrtiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Target tahun 2025 adalah 100%.

Sinkronisasi sasaran RPJMD Semesta Berencana dengan sasaran Renstra direncanakan pengukruan pencapaiannya seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Rencana Target Kinerja SPM Sub Urusan Bencana

Urusan	Indikator SPM	Target Kinerja / Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aspek pelayana n umum, urusan wajib dasar	Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar						
	Persentase capaian SPM sub urusan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memantapkan rencana pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) dalam RPJMD di Bab VIII yang terintegerasi dengan indikator kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis di Bab VI. Adapun rencana pengukuran pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) tahun 2025 seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator Kinerja Daerah	Target Kinerja / Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aspek pelayana n umum, urusan wajib dasar	5.Ketentramam, ketertiban, umum, dan perlindungan masyarakat						
	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD SB, 2025

2.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan urusan wajib dasar harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana startegisnya.

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMD dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 2.3 Visi, Misi RPJMD dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	4 Sasaran	-

Sumber : Renstra BPBD, 2025

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.” Adapun penjabaran atas pengukuran keberhasilan dan kegagalan pengukuran indikator tujuan yang selaras dengan RPJMD Semesta Berencana di urusan wajib pelayanan dasar seperti berikut ini.

b. Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada empat sasaran yang merupakan penjabaran atas dua tujuan organisasi untuk diukur adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran BPBD

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	1.1	Pengurangan Risiko Bencana
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD

Sumber : Renstra BPBD, 2025

c. Strategi

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*) dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun sasaran dan strategis disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Sasaran dan Strategi BPBD

No.	Sasaran	Strategi
1.	Pengurangan Risiko Bencana	Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
		Respon cepat terhadap penanganan bencana
		Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja

Sumber : Renstra BPBD, 2025

d. Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Ada lima bidang prioritas dan dua bidang penunjang yang menjadi acuan kebijakan pembangunan yaitu :

1. Bidang pangan, sandang, papan
2. Bidang pendidikan dan kesehatan
3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan
4. Bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya
5. Bidang pariwisata
6. Bidang infrastruktur fisik dan digital

7. Bidang lingkungan hidup

Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Strategi dan Kebijakan BPBD

No	Strategi	No	Kebijakan
1	Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.1	Pengurangan Risiko Bencana dengan pembentukan Destana, Sosialisasi, Diklat kebencanaan, di Wilayah Kabupaten Tabanan
2	Respon cepat terhadap penanganan bencana	2.1	Melayani Masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana
3	Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran	3.1	Mengembalikan fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana
4	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja	4.1	Melakukan bimtek teknis dan adminsitasi untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur

Sumber : Renstra BPBD, 2025

e. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan Permendagri yang disajikan seperti tabel di berikut ini.

Tabel 2.7 Sasaran, Program, dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi umum perangkat daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra BPBD, 2025

2.3 Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Tabanan. RKPD disusun berdasarkan hasil musrenbang, *focus group discusion* dan forum perangkat daerah untuk menentukan arah dan strategi pembangunan tahun 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tabanan. Usulan pembangunan yang diajukan merupakan hasil rumusan usulan melalui cara partisipatif, teknokratik, maupun politis. Hasil kajian TAPD Kabupaten Tabanan menunjukkan tidak semua usulan mendapatkan anggaran karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang ada sehingga program prioritas saja yang difokuskan pendanannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan terobosan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah maka melakukan konsultasi, koordinasi dan mengajukan usulan pendanaan yaitu :

- a. Usulan pendanaan ke APBD Provinsi antara lain memohon pelatihan teknis dasar-dasar penanggulangan bencana, gelar peralatan, dan bimtek SPM bagi aparatur.
- b. Usulan pendanaan ke APBN antara lain memohon peralatan tanggap bencana, kendaraan respon time, dan logistik.
- c. Usulan bantuan logistik kebencanaan kepada BUMN dan Perbankan untuk penyediaan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Hasil verifikasi renja awal (ranwal), renja akhir (ranhir), renja induk, dan renja perubahan sudah selaras program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikatornya dengan yang ada di RKPD sehingga pengukuran kinerja yang dilakukan setiap triwulan dapat akurat.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta RPJMD Kabupaten Tabanan. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki dokumen IKU sesuai Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/310/01/2022 tentang Indikator Kinerja Utama. Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama BPBD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58
2	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75%	80%	85%	85%	90%	90%	95%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

Sumber : Renstra BPBD, 2025

2.5 Rencana Kerja Tahunan

a. Musrenbang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan yang mengacu pada visi dan misinya tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui tiga pendekatan yaitu partisipatif, teknokratik dan politis.

- a. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui penyerapan aspirasi dan partisipasi aktif usulan pembangunan dari musyawarah desa (musrendes) yang tertuang dalam perdes, musyawarah kecamatan (musrencam), musrenkab, musren provinsi, musrenbangnas, dan e-planing. Hasil musrenbang direkap oleh Bappeda dan disampaikan ke masing-masing perangkat daerah sesuai bidang urusannya untuk dimasukkan dalam forum perangkat daerah.
- b. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui perencanaan pada instansi pemerintah dalam upayanya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. BPBD telah mengikuti alur perencanaan secara teknokratik mulai dari penyusunan rencana awal (ranwal), rencana akhir (ranhir), renja induk, dan renja perubahan yang diselaraskan dengan RKPD.
- c. Pendekatan politis dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam menjalankan RPJMD SB dan RKPD melalui pokok-pokok pikiran dewan (pokhir) yang diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan. BPBD selalu mendapat perhatian dalam pelayanan wajib dasar untuk pemenuhan hak dasar warga rawan bencana seperti termuat dalam rekomendasi DPRD.

b. KUA

APBD Kabupaten Tabanan pada prinsipnya disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja. Berkenaan dengan aspek perencanaan dan penganggaran, diamanatkan beberapa prinsip dasar yaitu :

- Pengintegrasian/ sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran,
- Penyusunan anggaran didasarkan atas kebijakan yang memiliki perspektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*),
- Penganggaran berbasis pada hasil (*performance budgeting*)
- Penganggaran terpadu (*unified budgeting*)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima KUA induk dan KUA perubahan sebagai dasar penyusunan RKA.

c. RKA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah mendapatkan KUA diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang secara detail berisikan urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah dana indikator dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran, dan uraian belanja.

Langkah-langkah kinerja perencanaan anggaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu :

- Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, dan Fungsional Umum menyusun kajian teknokratik usulan kegiatan prioritas.
- RKA disusun secara bertingkat, dimana draf RKA disusun di Kasubag dan Kabid sesuai tupoksinya masing-masing di bawah koordinasi Sekretaris BPBD.
- Draft RKA diverifikasi di PPK dan PA untuk selanjutnya diinput pada SIPD.
- Hasil RKA diteliti oleh TAPD yang terdiri dari unsur Bappeda dan Bakeuda untuk selanjutnya direviu oleh Inspektorat.
- Hasil asistensi dilakukan penyempurnaan kembali ke SIPD RI untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ke provinsi.

d. DPA

RKA yang telah mendapat verifikasi dari provinsi diinput dalam SIPD menjadi DPA yang akan dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dokumen Perencanaan Anggaran dan Belanja Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025. Dengan rincian seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Penjabaran Anggaran TA 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target Perubahan	Pagu Induk (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.749.198.800	5.805.275.900
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5.499.000	4.760.900
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 Dokumen	2.499.000	2.644.500
b	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Laporan	2.500.000	2.116.400
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	4.171.657.400	4.171.437.800
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	35 Orang	4.169.158.000	4.169.206.600
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Aset yang tersedia	2 Laporan	2.499.400	2.231.400
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	63.969.700	46.552.100
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	0 Paket	2.499400	0
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	1.997.500	1.997.500
c	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic yang disedisksn	1 Paket	27.000.000	20.251.000
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket	4.500.000	3.880.700
e	Penyediaan Bahan/material	Jumlah paket bahan yang disediakan	3 Paket	10.000.000	8.870.000
f	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan	12.974.000	6.868.000
g	Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4.998.800	4.684.900

	Dinamis pada SKPD	Penataan arsip dinamis tersedia			
4	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	258.323.800	258.323.800
a	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel tersedia	0 set	0	0
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin tersedia	8 unit	258.323.800	258.323.800
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.156.394.600	1.175.594.600
a	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan surat menyurat	12 laporan	2.000.000	2.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	3 Laporan	31.997.000	51.197.000
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedia	12 Laporan	1.122.397.600	1.122.397.600
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	93.354.300	148.606.700
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 unit	76.575.000	92.755.400
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Output: Jumlah peralatan dan mesin terpelihara	16 unit	16.597.300	55.851.300
A	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	100%	559.212.400	562.221.200
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	100%	20.000.000	20.000.000
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi kebencanaan	133 Orang	20.000.000	20.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Becana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	170.000.000	167.203.800
a	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	180 orang	25.000.000	23.994.500
b	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan atau kawasan-kawasan straetgis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan	1 Desa	25.000.000	23.731.300

		mengahdapi bencana			
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam penegndalian operasi darurat bencana (per jenis) kabupaten/kota	100 orang	20.000.000	19.478.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	349.212.400	349.212.400
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam hasil dokumen laporan kaji cepat	100 %	349.212.400	349.212.400
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	20.000.000	25.805.000
a	Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	20.000.000	25.805.000
	Jumlah			6.308.411.200	6.367.497.100

Sumber : DPA, 2025

2.6 Perjanjian Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra dan RPJMD SB tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebanyak dua kali yaitu di bulan Januari dan di bulan Oktober karena adanya perubahan anggaran pendukung program, selengkapnya seperti berikut ini.

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Program
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Indeks resiko bencana	Terjawabnya 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indek risiko bencana	144,47	Penanggulangan Bencana
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap	Jml masyarakat yang telah mendapat layanan	100%	Penanggulangan Bencana

	layanan kebencanaan	kebencanaan dibagi Jml masyarakat yang membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100		
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penialian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi BPBD Kabupaten Tabanan	90	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Penilaian laporan kinerja perangkatd aerah dari Inspektorat	A	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

Sumber : PK, 2025

2.7Formula Pengukuran Kinerja Mendukung Indikator pada RPJMD

Sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengemban amanah di misi pertama pada sasaran pertama yaitu terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Adapun dua indikator yaitu SPM dan IKD seperti berikut ini.

- a. Pengukuran SPM (Standar Pelayanan Minimal) sub urusan bencana

Pengukuran kinerja SPM yang tertuang pada Bab VIII RPJMD tentang IKU pemerintah daerah nomor 1. Pengukuran SPM ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.11 Pengukuran SPM Sub Urusan Bencana

SPM	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Jumlah realisasi pelayanan kebencanaan dibagi target layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretriati

RPJMD SB, 2021-2026

- b. Pengukuran IKD (Indikator Kinerja Daerah)

Pengukuran kinerja IKD yang tertuang pada Bab VIII RPJMD ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.12 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggun gjawab
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah warga negara yang terlayani dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekreatriati

RPJMD, 2021-2026

2.8Formula Pengukuran Kinerja Mendukung Indikator pada Renstra PD

Indikator kinerja yang telah ditetapkanpada rencana strategis BPBD yaitu indikator kinerja utama yang didukung oleh indikator kinerja program.

a. Pengukuran IKU

Pengukuran kinerja utama ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.13 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Indeks resiko bencana	Tercapainya 71 indikator dan 284 pertanyaan pengurangan risiko bencana	144,47	Bidang I Bidang II Bidang III
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah masyarakat yang telah mendapat layanan kebencanaan dibagi Jml masyarakat yang membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Penilaian reformasi birokrasi perangkat daerah	90	Sekretariat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKJIP	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten	A	Sekretariat

Sumber : PK 2025

b. Pengukuran IKP (Indikator Kinerja Program)

Indikator kinerja program diukur untuk memberikan informasi dukungan kinerja program dan pendanaannya. BPBD didukung oleh 2 (dua) program yaitu 1 (satu) program penanggulangan bencana dan 1 (satu) program penunjang. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.14 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggun g jawab
Penanggulan gan bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yang terjadi dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III

Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dibagi jumlah administrasi perkantoran dikali 100	100%	Sekretariat
---	---	---	------	-------------

Sumber : PK, 2025

2.9Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi atas perjanjian kinerja disusun oleh masing-masing aparatur dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Adapun rencana aksi seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Rencana Aksi Pencapaian Target IKU

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Triwulanan			
			I	II	III	IV
Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A (81)	-	A	-	-

Sumber : Renja, 2025

2.10 Monev Capaian Rencana Aksi

Pengendalian program dan kegiatan secara berjenjang memegang peranan penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelayanan publik kebencanaan. Manajemen di BPBD berupaya melakukan monev capaian rencana aksi triwulanan agar dapat memberikan dampak lebih luas kepada instansi dan masyarakat rawan bencana. Adapun rencana aksi kebencanaan disajikan seperti terlampir.

2.11 Casscading

Casscading telah disusun secara berjenjang, sehingga masing-masing eselon sesuai dengan kelas tanggungjawabnya. Adapun Eselon II bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian SPM, IKD (indikator kinerja daerah) dan IKU (indikator kinerja utama), Eselon III bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKP (indikator kinerja program), dan Eselon IV dan fungsional bertanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian IKK (indikator kinerja kegiatan). Adapun cascading disajikan sepeti terlampir.

2.12 Crosscating

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengidentifikasi dana merumuskan pentingnya crosscating dalam pengelolaan perencanaan berbasis kinerja sehingga hasil dan dampaknya dapat dioptimalkan. *Crosscating* ini dipandang sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga diperlukan koordinasi lintas sectoral untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun crosscating disajikan seperti terlampir.

2.13 Pohon Kinerja

Pohon kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam akuntabilitas kinerja BPBD. Pohon kinerja disajikan seperti terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Sistem AKIP mengamanahkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-asessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja untuk mengukur IKU berpatokan dengan formula (definisi operasional) dalam perencanaan kinerja yaitu mengukur 2 (dua) indikator kinerja utama yang didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program dengan anggarannya masing-masing.

3.2 Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

a. Waktu pengumpulan data kinerja

Frekuensi pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala sesuai rencana aksi atas perjanjian kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan pengolahan data kinerja dan dilakukan evaluasi capaian indikator kinerja utama yang didukung dari capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) sangat tepat

dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

b. Penanggungjawab

Penanggungjawab evaluasi kinerja sesuai amanah peraturan yang berlaku adalah secara berjenjang yaitu :

- Kepala BPBD bertanggungjawab kepada kebijakan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis kabupaten yang diukur dalam indikator SPM, dan indikator kinerja daerah (IKD).
- Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab kepada sasaran strategis BPBD yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan dukungan anggaran program.
- Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggungjawab kepada capaian yang tertuang dalam indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK).
- Kasubag Umum dan Keuangan memfasilitasi pencapaian indikator sub kegiatan bersama fungsional umum sehingga terukur secara bertingkat.

c. Mekanisme Perhitungan

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan rumus yang digunakan :

Persentase pencapaian rencana tingkat Realisasi x 100%

capaian

Rencana

d. Media yang Digunakan

Media yang digunakan dalam evaluasi kinerja baik itu pengukuran terhadap indikator kinerja melalui :

- Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis *call center* dan sistem informasi kebencanaan yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Data tersebut selain dapat diketahui setiap hari juga direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Pengumpulan data pencegahan dan mitigasi bencana yang diusulkan masyarakat / program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah.
- Rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi data kinerja yang dikumpulkan oleh Sekretariat, Bidang, Pusdalops, dan TRC (Tim Reaksi Cepat).
- Rapat teknis triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk mengevaluasi data kinerja dengan permasalahan, upaya pemecahan, dan rencana tidak lanjutnya

- kedepan.
- Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, PMI, Satgas, Forum PRB, Swasta, Tagana, Basarnas, desa, dan lainnya).

Semua aparat BPBD berkomitmen melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan kedepan sesuai arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana.

3.3Capaian Kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, casscading, dan rencana aksi atas perjanjian kinerja. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya dan sejauh mana dapat dicapai diperbandingkan dengan periode akhir perencanaan jangka menengah yang ada di Renstra Tahun 2021-2026.

Hasil pengumpulan, pengukruan, dan pengolahan data kinerja pada capaian 2 tujuan perangkat daerah, 2 sasaran strategis, dan 2 program seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Sumber
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	144,47	116,72	80,64	Penilaian BNPB Nomor B-46/BNB/D-I/SS.01.02/1/2026 tanggal 30 Januari 2026
2	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100,0	Laporah Humas Informasi Penanggulangan Bencana 2025
3	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90	-	-	Evaluasi reformasi birokrasi tidak dilakukan tahun 2025 (BPBD bukan sample RB general dan RB tematik)
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A (81)			Nilai AKIP 2025 belum terbit dari Inspektorat

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2025

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama diatas, maka BPBD melaksanakan 2 (dua) program : 1).Program penanggulangan bencana dan 2).Program penjunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Program

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	Penanggulang an bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100,0	Didukung 4 kegiatan layanan kebencana an
2	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100,0	Didukung 6 kegiatan pelayanan administrasi
	Rata-rata				100,0	

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2025

3.4 Analisis Capaian Kinerja

3.4.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun Ini

Hasil pengolahan data atas capaian indikator tujuan dan indikator kinerja sasaran, dan indiaktor kinerja program yang saling terkait tersbut, maka Tim Data Kinerja telah menganalisisnya dan hasilnya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.3 Analisis Kinerja dibandingkan target Renstra

No	Tujuan BPBD	Indikator	Target	Realisasi	%	Analisis
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	144,47	116,72	80,64	Capaian penurunan IRB melampaui target akhir Renstra : 141,58
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90	-	-	BPBD tidak sebagai sampel penilaian RB general dan RB tematik
	Rata-rata				-	
No	Sasaran BPBD	Indikator	Target	Realisasi	%	Analisis
1	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100,0	Capaian sudah mencapai target IKU di akhir Renstra : 100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A (81)			Nilai AKIP tahun 2025 belum terbit. Target akhir Renstra : 81 (A)

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2025

Kinerja tujuan dan sasaran diatas didukung oleh kinerja program yaitu program penanggulangan bencana dan program penunjang urusan pemerintahand aerah kabupaten/ kota. Hasil analisis disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Analisis Kinerja Progam mendukung IKU

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	%	Analisis
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100	Pelayanan administrasi di 6 kegiatan sudah semuanya memberikan pelayanan
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	100	Semua permohonan pelayanan sudah dapat dilayani sesuai budaya kerja kebencanaan
	Rata-rata				100	

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dari tujuan terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana yang diukur dengan indikator indeks risiko bencana yang dinilai oleh pusat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di tahun 2024 dengan IRB : 122,13 dan dapat diturunkan di tahun 2025 dengan IRB : 116,72 atau yang menunjukkan capaian penurunan risiko mencapai 4,43% dari tahun 2024.
- b. Dari tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD dengan indikator Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditargetkan 90, namun sejak tahun 2024-2025 tidak ada penilaian mandiri atas reformasi birokrasi perangkat daerah, hanya perangkat daerah tertentu disampel dalam penilaian RB general dan RB tematik atau BPBD tidak termasuk sampel RB.
- c. Dari sasaran pengurangan risiko bencana dengan indikator persentase waktu tanggap layanan kebencanaan di tahun 2025 dengan target 100% dan sudah tercapai 100% yaitu semua usulan masyarakat yang terampak bencana sudah dapat terlayani dengan budaya kerja *respon time* 24 jam 7 hari kerja. Ini menunjukan BPBD dan mitra kerja kebencanaan telah berhasil dalam memberikan pelayanan wajib dasar sub urusan bencana dan tidak ada pengaduan masyarakat di SP4N LAPOR.
- d. Dari sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi BPBD dengan indikator nilai LKjIP di tahun 2025 dengan target A (81), namun masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan atau nilai AKIP perangkat daerah belum terbit.

3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dasar sub urusan bencana telah mengukur kinerja sesuai yang diperjajikan. Adapun hasil perbandingan kinerja tahun 2022-2025 disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.5 Perkembangan pencapaian indikator kinerja tujuan

No	Tujuan / Sassaran	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun					Ketera ngan
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tabanan tangguh menghadapi bencana mulai dari desa	Indeks risiko bencana	153,27	143,87	136,90	122,13	116,72	Penilaian BNPB Nomor B-46/BNB/D-I/SS.01.02/1/2026 tanggal 30-1-2026
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	62,24	65,29	78,48	-	-	Tahun 2024-2025 tidak ada PMPRB di perangkat daerah

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2025

Tabel 3.6 Perkembangan pencapaian indikator kinerja sasaran

No	Tujuan / Sassaran	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun					Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kinerja mencapai target di akhir target Renstra :100%
2	Meningkat nya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	B	BB	BB	BB		Kinerja dibawah target akhir Renstra : A

Sumber : Laporan Kinerja BPBD, 2025

Dari tabel analisa perkembangan capaian kinerja tahun 2021-2025 dapat diuraian sebagai berikut :

- a. Dari kinerja tujuan terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana di tahun 2021-2025 menunjukkan BPBD dengan dukungan mitra kerja BPBD dalam penanggulangan bencana telah mampu setiap tahun menurunkan indeks risiko bencana. Tahun 2021-2022 dengan indeks risiko bencana di Kabupaten Tabanan dalam katagori tinggi (diatas 144,0) dan dapat menurun ke katagori indeks risiko sedang mulai tahun 2023-2025 (IRB katagori risiko sedang : 13,0-144,0).
- b. Dari kinerja tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD di tahun 2021-2023 menunjukkan kinerja reformasi birokrasi masih di bawah target tahunan, sehingga diperlukan kerja keras dalam tata kelola reformasi birokrasi di pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan.

- c. Dari kinerja sasaran pengurangan risiko bencana menunjukkan pelayanan kebencanaan dengan budaya kerja 24 jam 7 hari kerja dari tahun 2021-2025 sudah sesuai harapan karena 100% usulan masyarakat yang terdampak bencana sudah dapat dilayani kebutuhan dasarnya sesuai amanah peraturan bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat rawan bencana maupun masyarakat yang terdampak bencana.
- d. Dari kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi BPBD di tahun 2021-2025 masih di bawah target tahunan Renstra. Tahun 2021-2022 dengan nilai AKIP B dan dapat naik di tahun 2023-2024 dengan nilai RB. Untuk nilai AKIP tahun 2025 masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Dari tabel 3.4 dan tabel 3.5 dapat dianalisis perbandingan kinerja capaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra BPBD) yaitu :

- a. Dari kinerja indikator tujuan : Indeks risiko bencana menunjukkan di tahun 2025 dengan capaian IRB : 116,57 atau sudah jauh melebihi target akhir Renstra dalam penurunan IRB yang ditargetkan : 141,58.
- b. Dari kinerja indikator tujuan : hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2025 tidak dilakukan penilaian mandiri walaupun di akhir Renstra ditargetkan : 95, namun BPBD terus melakukan tata kelola reformasi birokrasi.
- c. Dari kinerja indikator sasaran : prosentase tanggap layanan kebencanaan di tahun 2025 sudah tercapai 100% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai berkat budaya kerja 24 jam 7 hari kerja dalam pelayanan kebencanaan.
- d. Dari kinerja indikator sasaran : nilai LKjIP di tahun 2025 masih dalam proses penilaian, dimana ditargetkan di akhir Renstra adalah A (81).

3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kabupaten/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan amanah urusan wajib dasar sub urusan bencana secara berkala mengikuti rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi Bali dan BNPB. Perbandingan kinerja BPBD Kabupaten Tabanan dengan kabupaten/kota se-Bali dan Provinsi Bali tahun 2022-2025 disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.7a Perbandingan Nilai IRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai IRB 2022	Nilai IRB 2023	Nilai IRB 2024	Nilai IRB 2025	Ket
	Provinsi Bali	123,98	120,21	111,28	123,35	<i>Meningkat</i>
1	Kab. Badung	103,29	102,92	94,74	114,32	<i>Meningkat</i>
2	Kab. Bangli	128,65	125,04	117,37	102,84	Menurun
3	Kab. Buleleng	92,64	91,49	86,02	118,31	<i>Meningkat</i>
4	Kab. Gianyar	130,56	129,03	122,96	120,25	Menurun
5	Kab. Jembrana	157,92	150,15	133,06	153,46	<i>Meningkat</i>
6	Kab. Karangasem	129,11	121,24	110,78	131,44	<i>Meningkat</i>
7	Kab. Klungkung	125,41	126,93	124,33	149,50	<i>Meningkat</i>
8	Kab. Tabanan	143,87	136,90	122,13	116,72	Menurun
9	Kota Denpasar	104,39	89,18	90,13	103,11	<i>Meningkat</i>

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja Kabupaten Tabanan dalam menurunkan indeks risiko bencana dari tahun 2022-2025 terus menunjukkan keberhasilan karena indeks risiko bencana dalam katagori risiko bencana sedang sedangkan masih ada Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Jembrana katagori risiko bencana tinggi (sangat rawan bencana)

Tabel 3.7b Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi

No	Indikator	Provinsi/ Kabupaten	Nilai SAKIP				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP	Bali	78,44	78,72	79,20	78,99	79,73
2		Badung	78,07	76,88	76,07	76,92	76,82
3		Denpasar	73,33	74,57	76,82	76,33	76,98
4		Buleleng	68,85	69,15	68,84	69,50	69,55
5		Jembrana	67,80	67,99	68,68	68,96	69,44
6		Klungkung	66,05	67,38	67,67	67,71	69,98
7		Karangasem	68,47	66,09	65,88	66,25	66,31
8		Gianyar	67,51	66,86	67,67	61,85	66,82
9		Tabanan	65,85	65,97	67,19	68,00	68,65
10		Bangli	64,07	64,50	65,42	61,28	62,90

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Bali, 2026

Kinerja ini apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP BPBD Provinsi Bali maka nilai SAKIP BPBD Kabupaten Tabanan masih di bawah BPBD Provinsi Bali dan apabila dibandingkan dengan BPBD kabupaten / kota se-Bali nilai SAKIP Kabupaten Tabanan ada di nomor tujuh atau tidaklah terendah.

3.4.4 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan serta Upaya yang dilakukan

Hasil analisa atas keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan amanah urusan wajib dasar sub urusan bencana dapat disajikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

- Dalam mencapai tujuan terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana menunjukkan di tahun 2021-2022 dengan indeks risiko bencana di Kabupaten Tabanan dalam katagori tinggi (diatas 144,0) dan dapat menurun ke katagori indeks risiko sedang mulai tahun 2023-2025 (IRB 13,0-144,0). Hal ini menunjukkan keberhasilan manajemen kolaborasi tim kebencanaan dalam menguatkan kapasitas masyarakat rawan bencana untuk memahami dan teredukasi dalam mitigasi bencana sehingga masyarakat menjadi siaga dan tangguh bencana. Tahun 2025 sudah disosialisasikan secara tatap muka kepada 5.235 orang (4.327 orang siswa SD, SMP, SMK, 107 orang karyawan swasta, 370 masyarakat/ karang taruna, 370 aparat desa/ PKK desa, dan 93 aparat dan koramil) serta sosialisasi melalui media sosial dan media komunikasi radio dan RAPI kepada 133 desa rawan bencana.
- Dalam mencapai sasaran pengurangan risiko bencana menunjukkan pelayanan kebencanaan dengan budaya kerja 24 jam 7 hari kerja dari tahun 2021-2025 sudah sesuai harapan karena 100% usulan masyarakat yang terdampak bencana sudah dapat dilayani kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat tertangani atau mendapat pelayanan tanggap bencana dan pemulihan pasca bencana melalui bantuan logistik dan bansos pasca bencana. Pelayanan tanggap bencana sudah 100% dan tidak ada pengaduan di SP4N LAPOR, data pelayanan tahun 2025 disajikan seperti berikut ini.
 - 127 titik penanganan bencana cuaca ekstrem pohon tumbang
 - 80 titik penanganan bencana longsor
 - 36 titik penanganan bencana banjir
 - 44 titik penanganan bencana lainnya (orang hilang, orang hanyut, lainnya) dan sudah dievakuasi 8 korban meninggal
 - 11 titik pemberian logistik bencana kebakaran rumah tinggal
 - 339 titik pemberian logistik bencana banjir, longsor, dan lainnya
 - 182 titik bansos pasca bencana akibat bencana alam

b. Kegagalan

- Dalam mencapai tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD menunjukkan kinerja reformasi birokrasi masih di bawah target tahunan. Hal ini setelah dilakukan analisis bahwa dari jumlah PNS yang 14 orang di struktural belum semuanya memahami manajemen refomasi birokrasi, SPIP, dan maturitas risiko. Selain itu belum terisinya jabatan fungsional : JF Perencana, JF Pranata Humas, JF Analis Kebencanaan

yang sangat vital keberadaanya sehingga diperlukan kerja keras dalam tata kelola reformasi birokrasi di pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan karena bencana tidak data dihindari namun hanya dapat dimitigasi dengan manajemen kebencanaan yang baik.

- Dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi BPBD di tahun 2021-2025 masih di bawah target tahunan Renstra. Setelah dilakukan analisis menunjukan keterbatasan SDM yang trampil dan ahli dibidangnya utamaya belum adanya jabatan fungsional JF Perencana dan belum semua aparatur memahami SAKIP.

c. Upaya yang sudah dilakukan

Hasil analisa atas faktor penghambat dan upaya yang sudah dilakukan disajikan pada tabel berikut ini.

Table 3.8 Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan

No	Faktor penghambat	Upaya yang ditempuh
1	IKU : Penurunan indeks risiko bencana yang dinilai oleh BNPB dengan memenuhi 71 indikator disediakan datanya tersebar di intsansi pemerintah dan BUMN (7 instansi)	Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah dan PLN, rapat pembahasan pemenuhan 71 indikator, jemput bola memenuhi 284 pertanyaan, dan mengikuti verifikasi di tingkat provinsi dan pusat
2	Pelayanan kebencanaan :	
a	Pelayanan sosialisasi mitigasi bencana melalui pelayanan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada sekolah, karang taruna, karyawan swasta, dan masyarakat umum secara tatap muka belum di 133 desa	Setiap tahun diupayakan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan bencana secara tatap muka dan penyebaran surat edaran, dan pengumuman di media sosial dan website dengan 133 desa rawan bencana untuk membangun desa siaga dan tangguh bencana
b	Pelayanan kerentanan terhadap bencana di wilayah rawan bencana sangat tinggi (kejadian bencana) yang terjadi yang masuk dari masyarakat melalui call centre 0361-811171 dan WAG Pusdalops 083848568111	Menyusun rencana aksi penanganan kedaruratan/ tanggap bencana dan penyediaan logistik Menyusun rencana aksi penanggulangan bencana dan monev hasil renaksi bencana Menguatkan personil Pusdalops dan TRC
c	Pelayanan pasca bencana dimana tingginya kerusakan rumah tempat tinggal masyarakat namun anggaran sangat kecil dari APBD	Mengusulkan bantuan logistik ke BPBD Provinsi dan CSR ke BUMN, BUMD, dan swasta lainnya Menguatkan personil e-logpol
d	Meningkatnya usulan masyarakat yang terdampak pasca bencana tanah longsor, banjir, pohon tumbang, kebakaran, dan bencana lainnya untuk memohon bansos untuk pulih lebih cepat	Melakukan survey dan kajian kebutuhan atas usulan/ pengaduan masyarakat Menyusun kajian penanggulangan bencana sebagai bahan usulan perencanaan penganggaran APBD Menguatkan personil Jitupasna

	dari dampak bencana	
3	Manajemen risiko bencana belum sepenuhnya dapat mengantisipasi dinamika kebencanaan	Menyusun maturasi manajemen resiko bencana celah pengendalian, media pengkomunikasian, dan koordinasi dengan Inspektorat.
4	Data dan informasi : Semakin meningkatnya permintaan data kebencanaan yang up to date dari wartawan, pusdalops pusat, akademisi, dan masyarakat lainnya	Membentuk Pusdalops dengan Keputusan Sekda Tabanan Nomor 180/02/01/Hk/2025 tanggal 1 Agustus 2025 yang memberikan layanan 24 jam 7 hari kerja dalam data, informasi, komunikasi, dan pelaporan bencana
5	Kapasitas SDM kebencanaan : Belum terisinya formasi Fungsional Analis Bencana dan Fungsional Pranata Humas yang ditugaskan dalam pengkajian kebencanaan	Mengusulkan ke BKPSDM untuk pengusulan ke MENPAN RB untuk kelancaran pelayanan administrasi kajian kebencanaan Mengusulkan revisi peta jabatan terkait terbitnya Perka BNPB Nomor 1 tahun 2024
6	Anggaran kebencanaan : Efisiensi anggaran yang besar pada kegiatan pelayanan administrasi dan kebencanaan	Melaksanakan SPM sub urusan bencana sesuai skala prioritas dan berkoordinasi dengan Tim Binwas SPM kabupaten dan provinsi
7	Sarana kerja kebencanaan : Belum tepenuhinya standar teknis peralatan komunikasi dan belum adanya gudang logistik	Sarana komunikasi bencana di daerah pelosok dalam tanggap bencana secara swadaya membeli HT oleh petugas logistik dan gudang logistik sementara menggunakan ruang khusus
8	Sarana pelayanan administrasi : Masih belum lengkapnya sarana seperti almari arsip, filing kabinet, meja dan kursi pejabat dan staf, meja dan kursi rapat, komputer statistik kebencanaan	BPBD telah mengusulkan ke TAPD Kabupaten Tabanan untuk penyediaan sarana pelayanan administrasi untuk mendukung standar pelayanan sehingga akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan

Sumber : Laporan Kinerja, 2025

3.4.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dasar sub urusan bencana telah berupaya menerapkan manajemen efisiensi sumber daya aparatur untuk memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan untuk akuntabilitas kinerja BPBD. Hasil analisis menunjukkan terbatasnya pegawai di struktural dan belum adanya pejabat fungsional menjadikan kebijakan penugasan pegawai agar pelayanan dapat berjalan 24 jam 7 hari kerja. Adapun sebaran 76 pegawai dalam mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran BPBD sepeti berikut ini.

Tabel 3.9 Dukungan Aparatur dalam Kinerja Kebencanaan

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penanggung jawab
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi	Indeks resiko bencana	144,47	Bidang I : Kabid, Pelaksana, P3K : 6 orang Bidang II : Kabid, Pelaksana, P3K : 5 orang Bidang III : Kabid, Pelaksana, P3K : 6 orang Pusdalops : 8 orang TRC : 35 orang

Bencana			JF Analis Kebencanaan : 0 orang
Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	Bidang I : Kabid, Pelaksana, P3K : 6 orang Bidang II : Kabid, Pelaksana, P3K : 5 orang Bidang III : Kabid, Pelaksana, P3K : 6 orang Pusdalops : 8 orang TRC : 35 orang JF Analis Kebencanaan : 0 orang
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	90	Sekretariat : Sekretaris, Kasubag, Pelaksana, P3K : 16 orang JF Perencana : 0 orang JF Pranata Humas : 0 orang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	Sekretariat : Sekretaris, Kasubag, Pelaksana, P3K : 16 orang JF Perencana : 0 orang JF Pranata Humas : 0 orang

Sumber : Data Diolah BPBD, 2025

b. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dasar sub urusan bencana mendapat dukungan anggaran sehingga pelayanan administrasi dan pelayanan pubik kebencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun dukungan anggaran tahun 2021-2025 seperti berikut ini.

Tabel 3.10 Anggaran Mendukung Tujuan dan Sasaran BPBD

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Penanggulangan bencana	3.106.7865.000	349.866.875	776.678.129	414.456.000	562.221.200
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	0	114.487.775	14.999.900	14.780.000	20.000.000
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.940.982.200	78.169.000	235.129.800	93.887.000	167.203.800
3	Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	165.802.800	157.210.100	526.548.420	280.763.000	349.212.400
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	25.228.000	25.805.000

Sumber : DPA, 2021-2025

Dalam pelaksanaan anggaran kebencanaan, BPBD berusaha melaksanakan efisiensi namun tetap mengoptimalkan pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Adapun efisensi anggaran di tahun 2025 disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Mendukung Pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 1

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Keterangan
A	Penanggulangan bencana	562.221.200	461.595.814	100.625.386	

			(82,10%)	(17,90%)	
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	20.000.000	18.742.471 (93,71%)	1.127.529 (6,29%)	
	Sub Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	18.742.471 (93,71%)	1.127.529 (6,29%)	Efisiensi ATK, BBM, mamin
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	167.203.800	158.765.109 (94,95%)	8.438.691 (5,05%)	
	Sub Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	23.994.500	18.273.269 (76,16%)	5.721.231 (23,84%)	Efisiensi ATK, BBM, mamin
	Sub Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	23.731.300	18.842.788 (79,40%)	4.888.512 (20,60%)	Efisiensi ATK, BBM, mamin
	Sub Penyusunan rencana kontingensi	100.000.000	99.676.113 (99,68)	323.887 (3,20%)	Efisiensi rekanan konsultan
	Sub Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	23.994.500	21.972.939 (91,57%)	2.021.561 (8,43%)	Efisiensi ATK, BBM, mamin
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	349.212.400	261.567.974 (74,90%)	87.644.426 (25,10%)	
	Sub Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	349.212.400	261.567.974 (74,90%)	87.644.426 (25,10%)	Efisiensi ATK, BBM, mamin
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	25.805.000	22.520.260 (87,27%)	3.284.740 (12,73%)	
	Sub Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	25.805.000	22.520.260 (87,27%)	3.284.740 (12,73%)	Efisiensi ATK, BBM

Mendukung Pencapaian Tujuan 2 dan Sasaran 2

No	Prgam, Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisai (Rp)	Efisiensi	Keterangan
A	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.805.275.900	4.332.719.229 (74,63%)	1.472.556.671 (25,37%)	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.900	4.266.347 (89,61%)	494.553 (10,39%)	Efisiensi ATK BBM, mamin rapat
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.171.437.800	2.889.581.318 (69,27%)	1.281.856.482 (30,73%)	Efisiensi Gaji 21 orang PPPK baru aprah TMT 1-7-2025
3	Administrasi umum Perangkat Daerah	46.552.100	32.093.270 (68,94%)	14.458.830 (31,06%)	Efisiensi ATK, logistik, perjalanan luar daerah
4	Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan PD	258.323.800	226.810.400 (87,80%)	31.513.400 (12,20%)	Efisiensi penawaran dari rekanan
5	Penyediaan jasa penunjang urusan	1.175.594.600	1.054.546.757 (89,70%)	121.047.843 (10,30%)	Efisiensi listrik, JKK,

	pemerintah daerah				JKM
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.608.700	125.421.137 (84,39%)	23.187.563 (15,60%)	Efisiensi BBM, servis kendaraan

Sumber : LRA, 2025

3.4.6 Analisa Program dan Kegiatan

a. Analisa Dukungan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan amanah di pelayanan wajib dasar sub urusan bencana setiap triwulan telah melaporkan kinerja SPM sub urusan bencana melalui spm.kemendagri.go.id yang terdiri atas kinerja 3 (tiga) jenis layanan dan kinerja anggaran yang mendukung 3 (tiga) jenis layanan tersebut. Adapun sinkronisasi 2 indikator kinerja program yang mendukung 2 indikator kinerja sasaran disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.12 Sinkronisasi sasaran dan kinerja program

No	Sasaran	Program	Indikator program	Pengukuran	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Pengurangan risiko bencana	Program penanggula ngan bencana	Prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana	Penanganan : 292 titik Usulan masyarakat : 292 titik	100%	100%	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi layanan : 6 dibandingkan dengan target layanan : 6	100%	100%	100

Sumber : Laporan Kinerja, 2025

b. Analisa Dukungan Kegiatan

Adapun sinkronisasi 10 indikator kinerja kegiatan yang mendukung 2 indikator kinerja program disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.13 Sinkronisasi kinerja program dengan kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Realisasi kinerja	%
1	Penangu guan bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan	10 kecamatan	100
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100
		Kegiatan	Prosentase	100%	100%	100

		pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana			
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	1 dokumen	100
	Rata-rata					100
2	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	69,27%	69,27
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	85,7%	85,7
		Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	100%	100%	100
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100
	Rata-rata					92,5

Sumber ; Laporan Kinerja, 2025

- Dari table 3.12 dan table 3.13 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Sasaran Pengurangan risiko bencana didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan dengan capaian *output* rata-rata sudah 100%.
 - b) Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan dengan capaian rata-rata output 92,5%.
 - c) Program penanggulangan bencana meliputi kegiatan prabencana, tanggap bencana dan pasca bencana, dimana di tahun 2025 sudah difasilitasi dengan baik oleh 3 (tiga) bidang.
 - Kegiatan prabencana melalui kegiatan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan kesiapsiagaan terhadap bencana yang menysasar masyarakat rawan bencana di 10 kecamatan yang tersebar di 133 desa.

- Kegiatan tanggap bencana melalui kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat terlayani kebutuhan dasarnya. Tahun 2021-2025 pelayanan yang sudah dilakukan berikut ini.
- Kegiatan pascabencana melalui penataan sistem dasar penanggulangan bencana dalam melayani masyarakat untuk pulih lebih cepat melalui survey kaji cepat kebutuhan dasar dan bantuan sosial melalui bantuan tidak terduga. Layanan disajikan berikut ini.

Tabel 3.14 Evaluasi Pelayanan Kebencanaan

No	Nama Stándar Pelayanan	Ko Pelaksanaan Teknis	Evaluasi
1	Pelayanan sosialisasi mitigasi bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sudah menyasar 5.325 aparatur, siswa, dan masyarakat umum
2	Pelayanan Pemberian Logistik Berencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sudah disalurkan ke 350 masyarakat terdampak bencana
3	Pelayanan Penanganan Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sudah tertangani 292 titik bencana
4	Pelayanan Bantuan Sosial yang tidak Dapat Direncanakan	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	Sudah difasilitasi 182 verifikasi lapang dan hasil kaji cepat kebutuhan rehabilitasi

Sumber : Laporan Kinerja, 2025

- d) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan pelayanan administrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel yang sudah difasilitasi oleh Sekretariat. Dari 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan, dari analisa menunjukkan ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terealisasi 100% dikarenakan :
- Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah pembayaran gaji PPPK penuh waktu dibayar 6 (enam) bulan sesuai SPMT sehingga ada efisiensi pembayaran gaji PPPK selama 6 bulan.
 - Pada kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dari 7 sub kegiatan pelayanan, hanya dilaksanakan 5 sub kegiatan sesuai DPA perubahan TA 2025 yaitu di 1 sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dinolkan dan dialihkan anggarannya untuk membayar listrik di sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dan 1 sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi diikuti secara *daring* dalam kegiatan Rapat Koordinasi BNPB

3.5 Realisasi Anggaran

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025, maka BPBD mengelola anggaran Rp. 6.308.411.200,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 6.050.087.400,00 (Belanja pegawai Rp. 4.149.358.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.900.729.400,00) atau 95,90% dan belanja modal sebesar Rp. 258.323.800,00 (4,10%).

Seiring dengan dinamika pembangunan maka adanya kebijakan efisiensi anggaran di anggaran pergeseran dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 59.085.900,00 sehingga anggaran yang dikelola menjadi Rp. 6.296.439.700,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 6.038.115.900,00 (Belanja pegawai Rp.4.149.358.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp.1.659.520.430,00) atau 95,89% dan belanja modal sebesar Rp. 258.323.800,00 (4,11%).

a. Belanja Pegawai

Aparatur di BPBD mengalami perubahan akibat adanya mutasi 1 orang PNS dan penambahan 21 orang PPPK. Jumlah aparatur/PNS di BPBD periode 31 Desember 2025 adalah sebanyak 14 orang PNS, 21 orang PPPK, Non PNS (11 tenaga admin dan 31 orang tenaga lapangan / TRC). Dukungan anggaran untuk belanja pegawai di TA 2025 di anggaran induk sebesar Rp. 4.149.358.000,00 dan tidak ada perubahan di anggaran perubahan atau tetap Rp. 4.149.358.000,00 atau kenaikan 0,0%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Upaya pelayanan penanggulangan bencana di tahun 2025 didukung oleh anggaran pada 2 program dan 10 kegiatan. Dukungan anggaran untuk belanja barang dan jasa di TA 2025 pada anggaran induk sebesar Rp. 1.900.729.400,00 dan naik di anggaran perubahan menjadi Rp. 1.693.945.430,00 atau turun Rp. 206.783.970 atau turun 10,88% karena adanya kebijakan daerah untuk efisiensi anggaran di belanja operasional penanggulangan bencana.

c. Belanja Modal

Dukungan anggaran untuk belanja modal di TA 2023 di anggaran induk sebesar Rp.24.939.800,00 namun di TA 2024 tidak mendapat anggaran atau Rp. 0,00 dan naik di TA 2025 menjadi Rp. 258.323.800,00 . Adapun realisasi keuangan belanja disajikan seperti tabel berikut ini.

d. Belanja Hibah

Dukungan anggaran untuk belanja hibah di TA 2023 - 2025 di anggaran induk dan perubahan sebesar Rp. 0,00 atau BPBD tidak mengelola dana hibah APBD Kabupaten.

Tabel 3.15 Realisasi keuangan

Jenis belanja	Pagu induk (Rp)	Pagu perubahan	Realisasi (Rp)	%
Belanja operasi	6.050.087.400	6.038.115.900	4.567.504.643	74,76
-Belanja pegawai	4.149.358.000	4.149.358.000	2.867.768.029	69,11
-Belanja barang/jasa	1.900.729.400	1.693.945.430	1.699.736.614	86,73
Belanja modal	258.323.800	258.323.800	226.810.400	87,80
-Peralata dan mesin	258.323.800	258.323.800	226.810.400	87,80
Belanja hibah	0	0	0	0
Total	6.308.411.200	6.296.439.700	4.794.315.043	75,29

Sumber : LRA, 2025

3.6. Rencana Tindak Lanjut atas LHE

Tindak lanjut atas rekomendasi LHE AKIP 2025 sesuai surat Inspektur Kabupaten Tabanan nomor 700.1.2.7/2805/LHE-2025/Irbn1/ltkab yang sudah dilakukan BPBD sebagai berikut :

- BPBD telah melakukan *up date* website dalam publikasi data, informasi, dan berita pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan
- BPBD telah mengikutkan personil mengikuti webinar, sosialisasi dan bimtek AKIP yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB dan Bagian Organissi Setda
- BPBD telah mengikutkan personil mengikuti sosialisasi manajemen risiko dan manajemen fraud yang dilakanakan oleh Inspektorat.
- Pimpinan secara berkala melaksanakan rapat internal dalam evaluasi program dan kegiatan serta kedisiplinan pegawai agar kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

Dari semua capaian tujuan dan sasaran BPBD diatas menunjukkan pembangunan urusan pilihan wajib dasar oleh BPBD Kabupaten Tabanan telah mampu dilaksanakan secara akuntabel dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah melakukan terobosan dalam penyempurnaannya :

- a. Indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2021-2026 yang sinergis dengan indikator kinerja daerah (IKD) pada RPJMD Semesta Berencana telah dijabarkan dalam rencana aksi pada rencana kerja BPBD dan semua aparatur telah melaksanakan tugas sesuai *cascading* sehingga semua berperan dalam peran

hasil seperti yang diamanahkan dalam peraturan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

- b. *Crosscutting* program untuk mewujudkan amanah SPM dengan indikator rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial) maka perangkat daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Kesbanpol, SatpolPP, BPBD, dan Dinas Sosial P3A bergotong royong melaksanakan pencapaian SPM tersebut agar amanah Misi 1 RPJMD dapat diwujudkan dan juga menjadi tugas yang diamanahkan Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri setiap triwulan dapat terealisasi dengan memberikan input data kinerja pada aplikasi spm.kemendagri.go.id.
- c. Dokumen pengukuran indikator kinerja yang diinput di aplikasi sistem perencanaan daerah sudah disinergiskan dengan Renstra tahun 2021-2026 sehingga RKPD, Renja, KUA, RKA, dan DPA menjadi terintegrasi.
- d. Penggunaan E-MONEV dan E-SAKIP sangat membantu semua OPD dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja akuntabilitasnya.
- e. Terbentuknya Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) tanggal 1 Agustus 2025 merupakan upaya membangun budaya kerja *respon time 24.7* dalam peenyediaan data, informasi, komunikasi kebencanaan sehingga pelayanan lebih optimal.
- f. Dokumen evaluasi kinerja disusun setiap triwulan dan evaluasi keuangan sudah disusun setiap bulan secara berkala melalui rapat rutin dan rapat teknis sehingga permasalahan yang dihadapi segera dapat dicarikan solusi pemecahannya sehingga pelayanan dapat berjalan baik sesuai SOP.
- g. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui diklat, bimtek, seminar, sosialisasi, workshop uji kompetensi baik dari anggaran APBD Kabupaten, APBD provinsi, dan APBN sangat membantu menguatkan kemampuan manajerial dan teknis.
- h. Pembinaan dan pendampingan dari Inspektorat dalam pencegahan korupsi melalui penerapan sikap anti gratifikasi, fraud, IEPK sangat membantu integritas pegawai.

BAB IV

PENUTUP

Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja merupakan modal dasar dalam melaksanakan amanah RPJMD dan Renstra.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah urusan wajib dasar, yang dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025 dan sudah mengikuti e-SAKIP yang diamanahkan pemerintah. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan inovasi kedepannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai realisasi atas Renstra dan Rencana Kerja tahun 2025.

4.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja sesuai amanah AKIP perangkat daerah.
- b. Tujuan terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa yang diukur dengan indikator indeks risiko di tahun 2024 sebesar 122,13 dan dapat diturunkan di tahun 2025 menjadi 116,72 atau katagori tingkat risiko sedang. Capaian ini menunjukan kinerja melampaui target akhir Renstra untuk menurunkan indeks risiko bencana : 141,58.
- c. Tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD yang diukur dengan indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi tahun 2024-2025 tidak dilakukan penialian (penialian RB general dan RB tematik hanya OPD sampel).
- d. Sasaran pengurangan risiko bencana yang diukur dengan indicator prosentase tanggap layanan kebencanaan di tahun 2025 sudah tercapai 100% karena semua usulan atau permohonan layanan bencana dapat dilayani dengan budaya kerja 24 jam 7 hari kerja sehingga belum ada pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR.
- e. Sasaraan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi BPBD yang dikur dengan nilai LKjIP tahun 2024 mencapai 72,85 atau BB dan tahun 2025 masih dalam

proses penilaian Inspektorat Kabupaten Tabanan.

- f. Program penanggulangan bencana yang mendukung sasaran pengurangan risiko bencana dengan indikator prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana tercapai 100% atau pelayanan kebencanaan sesuai dengan target akhir Renstra sebesar 100% yang berdampak juga pada pelayanan wajib dasar yang diukur dalam SPM sub urusan bencana.
- g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yang diukur dengan indikator presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD tercapai 92,5%, karena di 2 kegiatan belum tercapai 100% yaitu di kegiatan administrasi keuangan daerah tercapai 69,27% dan kegiatan administrasi umum perangkat daerah tercapai 85,7%. Walaupun capaian tidak 100% namun pelayanan administrasi sudah optimal karena mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran (belanja gaji PPPK dan perjalanan dinas luar daerah).
- h. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 75,29% yang terdiri dari capaian kinerja belanja pegawai 69,11%, belanja barang dan jasa sebesar 86,73%, capaian kinerja belanja modal sebesar 87,80% atau di bawah target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) karena dalam merealisasikan anggaran mengedepankan efisiensi anggaran.
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah juga didukung oleh pemerintah pusat dan provinsi berupa peralatan kebencanaan dan dari CSR pihak swasta dalam bentuk bantuan logistik penanggulangan bencana yang sudah disalurkan kepada penerima yang terdampak bencana banjir, longsor, kebakaran serta sudah dipertanggungjawabkan di tahun 2025.

4.2 Saran

Dari uraian hasil capaian dan analisis kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

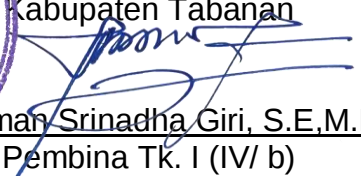
- 1. Upaya peningkatan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis.
- 2. Terhadap kinerja yang belum sesuai target, maka pimpinan BPBD telah menginstruksikan Sekretariat, Bidang, PUSDALOPS, dan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan analisis, pengkajian, bernimovasi, dan mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan untuk rencana aksi yang lebih kolaboratif.
- 3. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi

dengan berbagai *pentahelik* sehingga penurunan risiko bencana dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan peningkatan keahlian dan kemampuan aparatur melalui diklat, pelatihan, magang, workshop, dan peningkatan pendidikan yang lebih tinggi.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

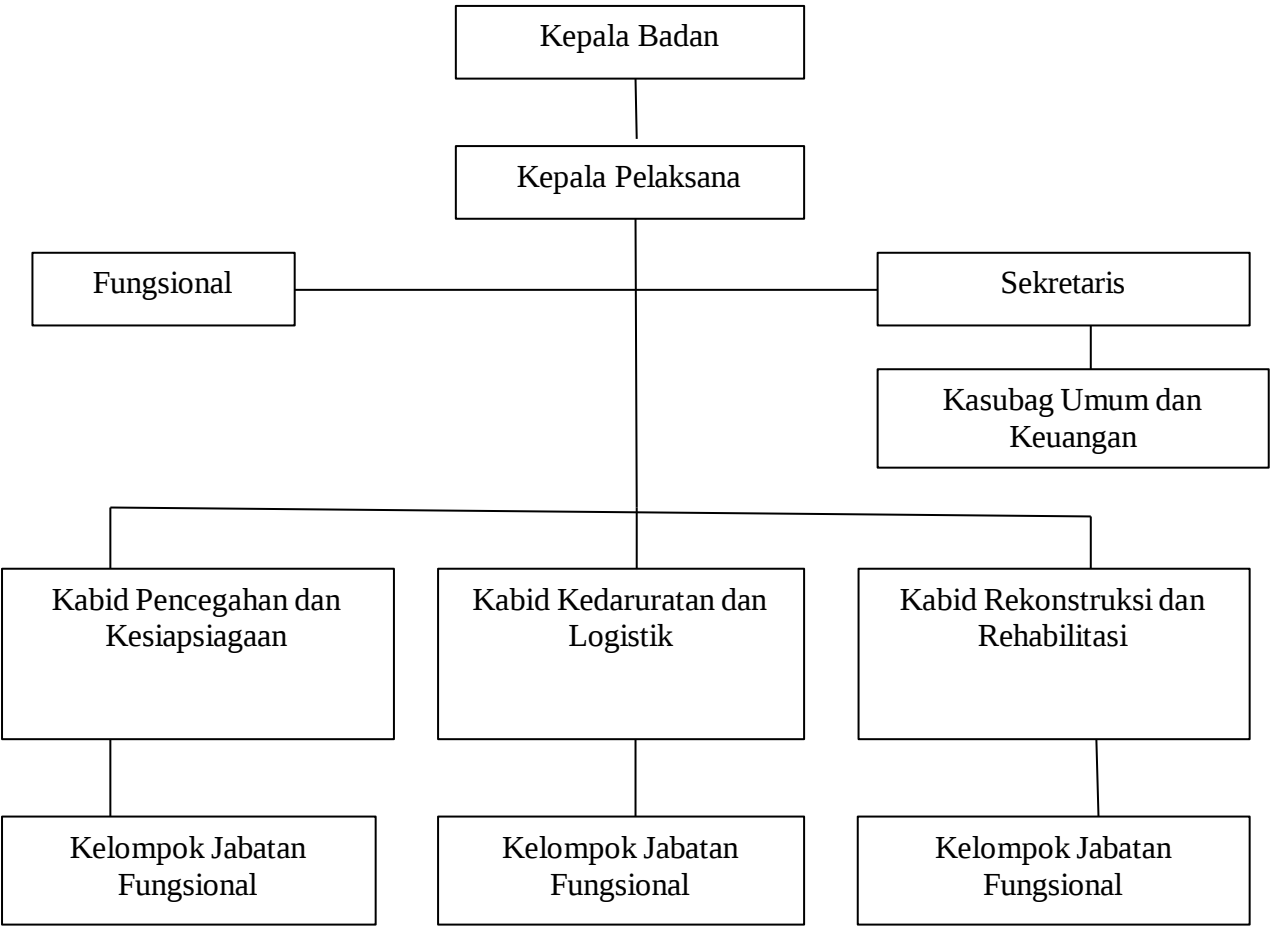
L A M P I R A N

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS 2121-2026
3. INDIKATOR KINERJA SPM
4. INDIKATOR KINERJA DAERAH
5. INDIKATOR KINERJA TUJUAN
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA
7. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
8. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
9. PERJANJIAN KINERJA (INDUK) 2025
10. PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) 2025
11. MATRIK RENCANA KERJA 2025
12. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA 2025
13. RENCANA AKSI 2025
14. MONEV RENCANA AKSI 2025
15. POHON KINERJA
16. CASCADING 2025
17. CROSCATING 2025
18. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2025
19. DOKUMENTASI PENCAPAIAN KINERJA 2025
20. TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022



LAMPIRAN 2

LAMPIRAN RENCANA STARTEGIS TAHUN 2021-2026

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir Tahun 2026		
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1 Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	1.463.300.106	100%	1.501.345.909	100%	1.546.386.286	100%	1.592.777.875	100%	1.640.561.211	BPBD
	1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	0	10 Kec	200.000.000	10 Kec	30.000.000	10 Kec	35.000.000	10 Kec	35.000.000	10 Kec	40.000.000	BPBD
	1.05.03.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	1 Dok	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
	1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersedianya Baliho, Spanduk, twiter, face book, Website dan bendera dalam media informasi bencana	3 Jenis	0	6 jenis	30.000.000	6 jenis	30.000.000	6 jenis	35.000.000	6 jenis	35.000.000	6 jenis	40.000.000	BPBD
	1.05.03.2..02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	1.113.172.300	100%	1.296.345.909	100%	1.311.386.286	100%	1.332.777.875	100%	1.350.561.211	BPBD
	1.05.03.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	1 Dok	170.000.000	0	0	0	0	0	0	BPBD
	1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda, Kelompok Tani, Yowana Desa yang mendapat pelatihan kebencanaan	50 orang	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	BPBD
	1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	0	2 Desa	2 Desa	70.000.000	2 Desa	70.000.000	2 Desa	80.000.000	3 Desa	120.000.000	3 Desa	120.000.000	BPBD
	1.05.03.2.02.07	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	100%	100%	1.043.172.300	100%	1.026.214.780	100%	1.028.251.223	100%	1.052.777.875	100%	1.060.561.211	BPBD
	1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	1 Dok	173.000.000	0	0	0	0	BPBD
	1.05.03.2.02.10	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi ruang luar dan dalam lapang penanggulangan bencana	0	0	0	0	1 kali	30.131.129	1 kali	30.135.063	1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	BPBD
	1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	150.127.806	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	BPBD
	1.05.03.2.03.02	Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100%	0%	100%	150.127.806	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	BPBD
	1.05.03.2.03.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Persentase tersedianya logistic tenda darurat dan dapur umum dalam penanggulangan bencana	100%	100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	BPBD

1	Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan di OPD	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%	3.094.468.250	100%	3.109.440.591	100%	3.203.238.809	100%	3.299.335.973	100%	3.398.316.052	BPBD
				1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	3 Dok	3 Dok	5.000.000	3 Dok	5.000.000	3 Dok	5.000.000	3 Dok	9.000.000	3 Dok	11.000.000	BPBD
				1.05.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	6.500.000	BPBD
				1.05.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	3.500.000	1 Dok	4.500.000	BPBD
				1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100%	1.804.588.000	100%	1.804.588.000	100%	1.807.088.000	100%	1.807.588.000	100%	1.807.588.000	BPBD
				1.05.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	1.801.588.000	100%	1.801.588.000	100%	1.801.588.000	100%	1.801.588.000	100%	1.801.588.000	BPBD
				1.05.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya Dokumen Aset BPBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	BPBD
				1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD pada BPBD	0	0	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	BPBD
				1.05.01.2.03.05	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tersusunnya laporan Barang Milik Daerah pada BPBD	0	0	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	100%	100%	100.359.100	100%	102.000.000	100%	111.906.009	100%	214.179.691	100%	228.500.000	BPBD
				1.05.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%	100%	100%	29.809.100	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	7.858.100	100%	10.000.000	100%	10.719.447	100%	13.679.691	100%	14.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
				1.05.01.2.06.07	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor tersedia	100%	100%	100%	14.000.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	15.000.000	100%	15.500.000	BPBD
				1.05.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%	40.191.900	100%	27.000.000	100%	35.186.562	100%	132.000.000	100%	136.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tertatanya arsip BPBD	0	0	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	15.000.000	BPBD
				1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100%	100%	24.076.350	100%	31.407.791	100%	85.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	BPBD
				1.05.01.2.07.05	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang tersedia	0	0	0	0	100%	0	100%	35.000.000	0	0	0	0	BPBD
				1.05.01.2.07.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	100%	100%	24.076.350	100%	31.407.791	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	BPBD
				1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	1.063.444.800	100%	1.064.444.800	100%	1.065.444.800	100%	1.065.944.800	100%	1.065.944.800	BPBD
				1.05.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	BPBD
				1.05.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	30.000.000	100%	31.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	BPBD
				1.05.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya penyediaan jasa umum kantor	100%	100%	100%	1.031.944.800	100%	1.031.944.800	100%	1.031.944.800	100%	1.031.944.800	100%	1.031.944.800	BPBD
				1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%	95.500.000	100%	100.500.000	100%	126.800.000	100%	150.623.482	100%	233.283.252	BPBD
				1.05.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/lapangan	100%	100%	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	76.800.000	100%	80.623.482	100%	113.283.252	BPBD
				1.05.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	100%	30.500.000	100%	30.500.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	BPBD
				1.05.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor BPBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	50.000.000	BPBD	

PENGUKURAN INDIKATOR SPM TAHUN 2025

a. SPM Urusan Wajib Dasar

No	SPM	Indikator tujuan	Formula	Target
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	Realisasi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dibagi target perencanaan dikalikan 100	100,0%

b. SPM Sub urusan bencana

No	SPM	Indikator tujuan	Formula	Target
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan sub urusan bencana	Realisasi SPM sub urusan bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100,0%

Sumber : Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja BPBD, 2025



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 4

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2025

a. Indiaktor Kinerja Daerah

Urusan / Aspek	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
5.6 Trantibunlinmas			
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	Jumlah layanan tanggap bencana dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikalikan 100%	100%

b. Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD dari BNPB	144,17%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90

Sumber : Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja BPBD, 2025



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

[Signature]

I Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 5

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai reviu LKjIP dari Inspektorat	A

Sumber : Pedoman Pengukuran Indiaktor Kinerja BPBD, 2025



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Sinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2025

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi kegiatan dalam menunjang pelayanan dibagi target kegiatan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Klinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Prosentase terpenuhinya pengadaan BMD	Realisasi pengadaan BMD dibagi target perencanaan pengadaan BMD dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjnag dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

LAMPIRAN 7
PERJANJIAN KINERJA (INDUK)

LAMPIRAN 8
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Nyoman Srinadha Giri, S.E.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Mengukur kinerja risiko bencana melalui 71 indikator yang dinilai oleh BNPB	144,47
2.	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan bencana	Jml masyarakat yg telah mendapat layanan kebencanaan dibagi Jml masyarakat yg membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100	100%
3.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi BPBD Kabupaten Tabanan	85
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil LKjIP	A

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penanggulangan Bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yg terjadi dikali 100	100%	559.212.400
2.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD dibagi Jml administrasi perkantoran dikali 100	100%	5.749.198.800

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Srinadha Giri, S.E.

Pihak Kedua

Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
A	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.	Pergelaran seni mitigasi bencana oleh Seniman Tangguh Bencana (SENTANA)	Perjanjian kerja sama BPBD dengan SENTANA	Jumlah komitmen kerja sama yang disepakati antara BPBD dan SENTANA	Jumlah komitmen kerja sama yang dilegalisas	1 dokume	
		Focus Grup Discusion BPBD dan Seniman Tangguh Bencana	Jumlah seniman tangguh bencana yang memahami mitigasi bencana	Jumlah seniman lokal Kabupaten Tabanan yang menguasai pengetahuan mitigasi bencana	4 Orang	
		Penyusunan dan penyebaran surat edaran mitigasi bencana	Jumlah desa yang menerima surat edaran mitigasi bencana	Jumlah desa rawan bencana menerima surat edaran mitigasi bencana	133 Desa	
		Pergelaran seni pertunjukan lawak / bondres di masyarakat dengan diselipi informasi mitigasi bencana	Jumlah dokumen even pertunjukan seni pertunjukan lawak/ bondres di masyarakat dengan diselipi materi mitigasi bencan	Jumlah dokumen even pertunjukan seni pertunjukan lawak/ bondres di masyarakat dengan diselipi materi mitigasi bencana	4 kali even	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	

2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan,

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.



පිහිටුනු ප්‍රදේශයේ පිහිටි
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
පිහිටි ප්‍රදේශයේ පිහිටි
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
පිහිටි ප්‍රදේශයේ පිහිටි
JALAN SEMILA JATI II, BANJAR TANAH PEGAT, DUSUN TONJA, DESA GUBUG, TABANAN
TELEPON (0361) 811171, Website : bpbdd tabanankab.go.id, e-mail : bpbdd@tabanankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Nyoman Srinadha Giri, S.E.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Srinadha Giri, S.E.M.M.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Mengukur kinerja risiko bencana melalui 71 indikator yang dinilai oleh BNPB	144,47
2.	Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan bencana	Jml masyarakat yg telah mendapat layanan kebencanaan dibagi Jml masyarakat yg membutuhkan layanan kebencanaan dikali 100	100%
3.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi BPBD Kabupaten Tabanan	85
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil LKjIP	A

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penanggulangan Bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yg terjadi dikali 100	100%	562.221.200
2.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD dibagi Jml administrasi perkantoran dikali 100	100%	5.805.275.900

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan,

Pihak Kedua
Bupati Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

I Nyoman Srinadha Giri, S.E, M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
A	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.	Pergelaran seni mitigasi bencana oleh Seniman Tangguh Bencana (SENTANA)	Perjanjian kerja sama BPBD dengan SENTANA	Jumlah komitmen kerja sama yang disepakati antara BPBD dan SENTANA	Jumlah komitmen kerja sama yang dilegalisasi	1 dokume	
		Focus Grup Discusion BPBD dan Seniman Tangguh Bencana	Jumlah seniman tangguh bencana yang memahami mitigasi bencana	Jumlah seniman lokal Kabupaten Tabanan yang menguasai pengetahuan mitigasi bencana	4 Orang	
		Penyusunan dan penyebaran surat edaran mitigasi bencana	Jumlah desa yang menerima surat edaran mitigasi bencana	Jumlah desa rawan bencana menerima surat edaran mitigasi bencana	133 Desa	
		Pergelaran seni pertunjukan lawak / bondres di masyarakat dengan diselipi informasi mitigasi bencana	Jumlah dokumen even pertunjukan seni pertunjukan lawak/ bondres di masyarakat dengan diselipi materi mitigasi bencana	Jumlah dokumen even pertunjukan seni pertunjukan lawak/ bondres di masyarakat dengan diselipi materi mitigasi bencana	4 kali even	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	

2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan,

I Nyoman Srinadha Giri, S.E, M.M.

LAMPIRAN 9

MATRIK RENCANA KERJA

No	Program / Kegiatan/Sub	Indikator	Target	Pagu Induk (Rp)	Pagu perubahan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.749.198.800	5.805.275.900
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5.499.000	4.760.900
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 Dokumen	2.999.000	2.644.500
b	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	1 Laporan	2.500.000	2.116.400
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	4.171.657.400	4.171.437.800
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	35 Orang	4.169.158.000	4.169.206.400
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Aset yang tersedia	2 Laporan	2.499.400	2.231.400
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	63.969.700	46.552.100
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 Paket	2.499.400	0
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	1.997.500	1.997.500
c	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic yang disedisksn	1 Paket	27.000.000	20.251.000
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket	4.500.000	3.880.700
e	Penyediaan Bahan/material	Jumlah paket bahan yang disediakan	3 Paket	10.000.000	8.870.000
f	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan	12.974.000	6.868.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan arsip dinamis tersedia	4 Dokumen	4.998.800	4.684.900
4	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	258.323.800	258.323.800
a	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel tersedia	2 set	0	0
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin tersedia	8 unit	258.323.800	258.323.800
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa oenunjag urusan pemerintah daerah	100%	1.156.394.600	1.175.594.600
a	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan surat menyurat	12 laporan	2.000.000	2.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	3 Laporan	31.997.000	51.197.000
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedia	12 Laporan	1.122.397.600	1.122.397.600
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	93.354.300	148.608.700
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 unit	76.757.000	92.755.400
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Output: Jumlah peralatan dan mesin terpelihara	16 unit	16.597.300	55.851.300
A	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	100%	559.212.400	562.221.200

1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	100%	20.000.000	20.000.000
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi kebencanaan	60 Orang	20.000.000	20.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Becana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	170.000.000	167.203.800
a	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	25.000.000	23.994.500
b	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan atau kawasan-kawasan straetgis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan mengahdapi bencana	3 Desa	25.000.000	23.731.300
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam penegndalian operasi darurat bencana (per jenis) kabupaten/kota	100 orang	20.000.000	19.478.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	349.212.400	349.212.400
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam hasil dokumen laporan kaji cepat	100 %	349.212.400	349.212.400
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	20.000.000	25.805.000
a	Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	20.000.000	25.805.000
	Jumlah			6.308.411.200	6.367.497.100



Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tabanan

I Nyoman Sinadha Giri, S.E,M.M

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi atas perjanjian kinerja disusun oleh masing-masing aparatur dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Adapun rencana aksi atas perjanjian kinerja utama tersebut disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel Rencana Aksi Pencapaian Target IKU

Sasaran Staretgis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Triwulanan			
			I	II	III	IV
Pengurangan risiko bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	-	A	-	-

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010



Lampiran 11

CASSCADING

KERTAS KERJA CASCADING BPBD										
CORE BUSSINES	ISU STRATEGIS/MASALAH	KINERJA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET KINERJA / TAHUN						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana	1 Belum optimalnya penerapan SAKIP dan RB di perangkat daerah	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1 Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	
	2 Tingginya potensi rawan bencana di daerah	2 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	2 Prosentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KERTAS KERJA CASCADING PROGRAM				
CORE BUSSINES	ISU STRATEGIS/MASALAH	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	
1	2	3	4	
Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana	1 Tingginya tuntutan transfarasi reformasi birokrasid an pelayanan publik	1 Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	1 Persentase layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD (100%)	
	2 Tingginya potensi rawan bencana	2 Meningkatnya penanganan pra bencana, tanggab bencana, dan pasca bencana	2 Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana (100%)	

Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Tabanan
[Signature]
 I Nyoman Srinadha Giri, S.E
 Pembina Tk. I (IV / b)
 NIP. 19740624 200604 1 010

KERTAS KERJA CASCADING SASARAN			
CORE BUSSINES	ISU STRATEGIS/MASALAH	KINERJA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME
1	2	3	4
Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana	1 Belum optimalnya penerapan SAKIP dan RB di perangkat daerah	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1 Nilai LKjIP (A)
	2 Tingginya potensi rawan bencana di daerah	2 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	2 Prosentase waktu tanggap layanan kebencanaan (100%)

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan
I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pemula Tk. I (IV / b)
NIP. 19740624 200604 1 010

KERTAS KERJA CASCADING KEGIATAN

TAHUN 2025

NO.	NAMA JABATAN	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN/OUTPUT
1	Kasubag Umum dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun (5 dokumen)
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD (100%)
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD (100%)
			4	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD (100%)
			5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor (100%)
			6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor (100%)
2	Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan (10 kecamatan)
			2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana (100%)
3	Kabid Kedaruratand an Logistik	Program Penanggulangan Bencana	1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%)
4	Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Program Penanggulangan Bencana	1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata (1 dokumen)



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV / b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 12

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2025

a. Capaian SPM

No	SPM wajib dasar	Indikator	Realisasi / tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	99,15	85,65%	95,78%	96,6%	97,18%
No	SPM bencana	Indikator	Realisasi / tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga Rawan Bencana	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan sub urusan bencana	96,8%	98,0%	100%	100%	100%

b. Capaian IKD

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	154.0	153,3	143,87	122,41	
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	73,0	78,18	78,18	78,48	84,94

c. Capaian IKU

No	Sasaran	Indikator	Realisasi / tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	B	BB	BB	BB

d. Capaian IKP

No	Program	Indikator	Realisasi / tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%

e. Capaian IKK

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi / tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec

	kabupaten/kota	informasi kebencanaan					
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	-	-	-	1 dok	1 dok
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
6	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100%	100%	69,27%
7	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	100%	100%	100%	85,7%
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%	100%	100%



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



Nyoman Sinadha Giri, S.E,M.M

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

70

LAMPIRAN 13

LAMPIRAN

DOKUMENTASI DUKUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU 1. Kegiatan mencapai indikator penurunan risiko bencana



IKU 2. Kegiatan mencapai indikator nilai LKjIP



LAMPIRAN 14

SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/386/01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, maka perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan membahas data / materi terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 3 Januari 2025

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/386/01/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025

- Pengarah/Pembina : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan; dan
4. Kasubbag Umum dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- Pelaksana Administrasi : Staf Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001